

## Anggaran Penanggulangan Banjir Capai Triliunan

**SAMARINDA, TRIBUN** – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menangani persoalan banjir tidak berhenti pada kegiatan lokal semata. Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) menegaskan, penanganan banjir di Kota Samarinda memerlukan pendekatan menyeluruh, baik dari sisi teknis, anggaran, hingga sinergi lintas pemerintahan.

Salah satu langkah konkret yang kini sedang didorong adalah pengadaan sistem pompa air di berbagai titik krusial di kota ini.

"Beberapa waktu lalu kami melakukan koordinasi dengan BWS (Badan Wilayah Sungai), tidak hanya di Loa Janan Ilir tapi juga terkait kondisi di seluruh kota. Kita membutuhkan paling tidak 10 pompa air dan biayanya hampir kurang lebih Rp850 miliar. Itu di luar lahan," ujar Andi Harun.

Nilai tersebut mencerminkan skala permasalahan dan besarnya kebutuhan infrastruktur untuk menanggulangi banjir secara efektif di Samarinda.

Namun, persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri, apalagi di tengah isu yang menyebutkan bahwa bantuan keuangan (bankeu) provinsi kepada Kota Samarinda akan ditiadakan pada tahun 2025.

"Mudahnya hanya *hoax* karena kasihan masyarakat kalau kebijakannya seperti itu. Tapi saya yakin itu *hoax*, saya yakin Gubernur dan Wagub juga punya perhatian kepada warga Samarinda," tegas Andi Harun.

Di samping itu, Wali Kota Samarinda ini menyatakan pihaknya juga telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi bantuan dana dari kementerian terkait.

"Saya juga akan bertemu dengan Wamen dan Menteri PUPR dan kami juga sudah mendapatkan lampu hijau, diutus khusus anggota DPR RI kita selama ini sudah peduli dengan Samarinda Kaltim yakni Budisatrio, yang akan berkomitmen terus membantu Kaltim dan Kota Samarinda. Dan kami telah menyerahkan kegiatan yang sudah ada perencanaan jangka pendek," terangnya.

Menurut Andi Harun, kunjungan pasca Idul Adha ke kementerian-kementerian teknis tersebut bertujuan untuk memperjuangkan agar program-program prioritas penanggulangan banjir di Samarinda yang memerlukan pembiayaan besar dapat didukung secara optimal oleh pemerintah pusat.

"Pompa saja anggaran kebutuhannya Rp850 miliar, sisa penanggulangan SKM (Sungai Karang Mumus) seperti pemancangannya butuh Rp900 miliar dan itu baru dua kegiatan. Belum lagi, bicara *dredging* sedimentasi di Waduk Benanga, apalagi berbicara tentang DAS (Daerah Aliran Sungai) dan relokasi penyediaan lahan, jadi tidak mudah," bebernya. Namun demikian, Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot tidak akan menyerah dalam upaya penyelesaian persoalan banjir.

la memastikan, setiap tahun pemerintah terus berkomitmen menyusun dan menjalankan program secara optimal, dengan semangat pantang mundur demi kesejahteraan warga Samarinda.

"Tapi saya ingin yakinkan bahwa pemerintah tidak pernah lelah dan berhenti untuk setiap tahun membuat program yang sudah kita rencanakan secara optimal," pungkasnya. (snw)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Anggaran Penanggulangan Banjir Capai Triliunan, 08/06/2025.

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) dijelaskan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Dalam Pasal 60 ayat (1) UU 24/2007 diatur bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Dalam Pasal 61 ayat (2) UU 24/2007 diatur bahwa penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.